

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa putusan Putusan PN Bale Bandung NO. 3/PID.C/2017/PN.BLB. tentang tindak pidana pelanggaran mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang. hasil putusan tersebut memutuskan terdakwa bersalah dan melanggar PERDA. Regulasi yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di kabupaten Bandung terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No.9/2010 Tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 3 Tahun 2004 Tentang Pe;arangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Penelitian ini dikumpulkan dengan teknik mempelajari melalui media cetak dan elektronika serta penafsiran otentik dan gramatikal. Hal ini dilakukan secara manual atau online serta dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang sudah ditentukan untuk melengkapi data. Secara manual peneliti mengunjungi perpustakaan, dan tempat-tempat informasi, serta melakukan pencarian melalui media internet.

Hasil Penelitian ini adalah analisis untuk mencari kejelasan tentang putusan Bale Bandung NO. 3/PID.C/2017/PN.BLB, apakah telah sesuai dengan peraturan Daerah dimana jika melanggar PERDA Kabupaten Bandung No.9/2010 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol akan mendapat sanksi menurut pasal 7 yaitu kurungan selama 6 bulan dan barang bukti yang disita di musnahkan. Namun dalam putusan tersebut terdakwa hanya mendapat hukuman kurungan selama 3 bulan dan barang bukti dikembalikan yang tentunya putusan tersebut tidak sesuai dengan sanksi. Yang seharusnya di berikan. Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya Hukum terhadap putusan tersebut ke pengadilan tinggi dengan mengajukan Banding. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang.

Kata kunci : Minuman Beralkohol, Perda, Sanksi

:

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the decision of Bale Bandung District Court No.3/PID.C/20017/PN.BLB, regarding a criminal offense of distributing alcoholic beverages without permission from the competent authority. The result of the decision was the defendant was guilty because violated PERDA. The regulations governing the circulation of alcoholic drinks in Bandung regency are contained in the Bandung regency Regional Regulation (PERDA) No.9/2010 concerning amendments to the Bandung Regency Regional Regulation NO.3 of 2004 concerning the Prohibitions Of circulation and Use of Alcoholic Beverages.

The data of this study were collected by studying techniques through print and electronic media as well as authentic and grammatical interpretation. This was done manually or online and by conducting interviews with people who have been determined, to complete the data. Manually, research visited the library, and places of information, and conducted searches through the internet media.

The result of this study are the analysis to look for clarity if the decisions Bale Bandung No.3/PID.C/20017/PN.BLB, is in accordance with local regulations which say that, if it violates Bandung Regency Regional Regulation No.9/2010 concerning amendments to the Bandung Regency Regional Regulation NO.3 of 2004 concerning the Prohibitions Of circulation and Use of Alcoholic Beverages the person will be sanctioned according to article 7, I.e confinement for 6 months and confiscated evidence is destroyed. However, in the ruling, the defendant only received a sentence of imprisonment for 3 months and the evidence was returned. Of course, the decision was not in accordance with the sanctions that should have given. The Public Prosecutor may submit legal remedies against the decisions to the high court by submitting an appeal. Legal remedies are the right of defendant or public prosecutor not to accept court decisions in the form of resistance or appeal or cassation or the right of the convicted person to submit or request for reconsideration and according to the method stipulated in the law.

Keywords: Alcoholic Beverages, Local Regulation, Sanctions